

Research Article

Elections And Development Of Democracy In Indonesia

Nur Fadillah

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail : nurffadiilah00@gmail.com

Didik Himmawan

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail : didikhimmawan@gmail.com

Ahmad Khotibul Umam

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail : khotibulumam905@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by Diplomasi : Jurnal Politik, Demokrasi dan Pemerintahan.

Received : 30 Oktober 2023

Revised : 23 November 2023

Accepted : 20 Desember 2023

Available online : 29 Januari 2024

How to Cite: Nur Fadillah, Didik Himmawan, & Ahmad Khotibul Umam. (2024). Elections And Development Of Democracy In Indonesia. Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 2(1), 17–23. <https://doi.org/10.58355/dpl.v2i1.6>

Abstract. The aim of this research is to find out about General Elections and the development of democracy in Indonesia. This research applies library methods, which are often referred to as library studies. This method is an effort by researchers to collect material related to research topics or problems from various sources, including books, scientific reports, theses, theses, dissertations, encyclopedias, and other sources, both in print and digital form. The results of this research are, the purpose of elections and the democratic nature of an election for the sake of developing democracy, there are also functions of elections that cannot be separated from each other, namely (1) As a means of political legitimacy, especially the need for the government and the political system to obtain sources of authority and its political power. (2) The function of people's representatives. Simultaneous national elections have a number of hypothetical advantages from the perspective of political institutionalization and democratic consolidation in Indonesia. (3) Simultaneous national elections encourage a more democratic quality of political parties.

Keywords: Election, Democratic Development, Political Parties.

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Pemilihan Umum dan pembangunan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode kepustakaan, yang sering disebut sebagai studi kepustakaan. Metode ini merupakan upaya peneliti untuk mengumpulkan materi terkait dengan topik atau permasalahan penelitian dari berbagai sumber, termasuk buku, laporan ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, ensiklopedia, dan sumber lainnya, baik dalam bentuk cetak ataupun digital. Hasil dari penelitian ini adalah, tujuan Pemilu dan demokratisnya sebuah pemilu guna kepentingan pembangunan demokrasi, juga terdapat fungsi pemilu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu (1) Sebagai sarana legitimasi politik, terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik untuk mendapatkan sumber otoritas dan kekuatan politiknya. (2) Fungsi perwakilan rakyat. Pemilu nasional serentak memiliki sejumlah keuntungan yang bersifat hipotetik dilihat dari sisi pelembagaan politik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. (3) Pemilu nasional secara serentak mendorong kualitas partai politik yang lebih demokratis.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Pembangunan Demokrasi, Partai Politik.

PENDAHULUAN

Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Prasyarat negara demokrasi negara modern adalah penyelenggaraan pemilu. Pemilu merupakan mekanisme utama dan prasyarat bagi demokrasi perwakilan. Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokratis.

Sistem demokrasi bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap dapat menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. Didalam gagasan demokrasi, kekuasaan tertinggi (kedaulatan) tetap ditangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip check and balances.

Gagasan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung lahir dan diimplementasikan dalam sistem politik Indonesia dengan latar belakang potret buram tirani kekuasaan pada rezim orde lama dan orde baru. Pada masa orde lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno pelanggaran terhadap konstitusi

terjadi tatkala soekarno menerima pengangkatan dirinya sebagai presiden seumur hidup menyusul dikeluarkannya TAP MPRS yang mengatur bahwa,; “Dr. Ir Soekarno, pemimpin besar revolusi Indonesia, yang sekarang Presiden Republik Indonesia, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan ini menjadi Presiden Indonesia Seumur Hidup”.

Akan tetapi fenomena saat ini pemanfaatan aparatur pemerintahan dan aset pemerintah untuk mendukung kemenangan pihak tertentu membuat pelaksanaan pemilu tidak berjalan adil. Sebetulnya partai politik telah menjadi kepentingan perorangan dan kepentingan kelompok. Kewajibannya seperti : kaderisasi, yang tidak memiliki visi secara jelas. Selain itu, ia mengamati, keberpihakan menjadi hal biasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kepustakaan, yang sering disebut sebagai studi kepustakaan. Metode ini merupakan upaya peneliti untuk mengumpulkan materi terkait dengan topik atau permasalahan penelitian dari berbagai sumber, termasuk buku, laporan ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, ensiklopedia, dan sumber lainnya, baik dalam bentuk cetak ataupun digital.

Kajian literatur merupakan suatu evaluasi yang menelusuri literatur yang mendukung isu khusus dalam penelitian yang sedang berlangsung. Kajian ini memberikan kontribusi penting bagi peneliti, termasuk memberikan gambaran terkait masalah penelitian, menyediakan dukungan teoritis dan konseptual, serta menjadi bahan diskusi atau pembahasan dalam penelitian (Creswell & Creswell J. D, 2017). Selain itu, kajian literatur dapat membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitian. Meskipun kajian literatur dapat mencakup deskripsi penuh, namun tidak hanya sekadar merangkum, melainkan juga memberikan penilaian dan menunjukkan hubungan antara berbagai bahan, sehingga menyoroti tema kunci. Langkah akhir, kemudian diambil kesimpulan dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengisian Lembaga Perwakilan dalam praktek ketatanegaraan lazimnya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pasca perubahan amandemen UUD 1945, semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan presiden serta kepala daerah dipilih dengan mekanisme Pemilihan Umum. Pemilihan umum menjadi agenda yang diselenggarakan secara berkala di Indonesia.

Ibnu Tricahyo (2009:6), mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai berikut: “secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan

rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat”.

Definisi diatas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintah yang sah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan (representative democracy). Wakil wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (general) aspirasi rakyat. Soedarsono (2005:1) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis”.

Demokrasi

Secara umum demokrasi dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan atau sistem politik yang didasarkan atas kepentingan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat, rakyat dilibatkan dalam segala aktifitas politik dan pemerintahan, baik dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan maupaun pengawasan. Melibatkan rakyat secara maksimal memungkinkan terciptannya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, sampai saat ini tidak ada pengertian yang dapat mendefinisikan secara lengkap tentang demokrasi. Prof. Juanda, dalam buku “Hukum Pemerintahan Daerah” mengutip pandangan beberapa para ahli tentang demokrasi, seperti Francis Venter yang menyatakan bahwa “Everyone knows what democracy is, but nobody can define it to general satisfaction.” (setiap orang tahu apa demokrasi, tetapi tidak seorangpun yang dapat mendefinisikan untuk memuaskan masyarakat). Begitu pula yang dipetik dari Mac Gregor Burn yang menyatakan bahwa “Democracy like liberty, equality, and justice is hard to define precisely” (demokrasi seperti kemerdekaan, kesamaan, dan keadilan adalah sulit untuk didefinisikan).

Pemilihan Umum Di Indonesia

Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, presiden dan wakil presiden. Konstitusi dalam pasal 22E UUD 1945 mengatur ketentuan tentang pemilu secara jelas dan detail, sebagai berikut :

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang.

Pemilihan Umum Nasional Serentak Mendorong Kualitas Parpol Yang Lebih Demokratis

Kehadiran dan peran partai politik saat ini menjadi prasyarat penting bagi praktik demokrasi modern, bahkan demokrasi modern adalah demokrasi partai (Richard S Katz, 1980). Literatur studi demokrasi umum menyebut adanya partai politik yang bebas, otonom, dan kompetitif merupakan *conditio sine quo non* bagi praktik demokrasi. Sistem politik demokratis diyakini mampu memfasilitasi kehidupan partai politik yang bebas, otonom, dan kompetitif, maka demokratisasi partai politik mensyaratkan demokratisasi sistem politik terlebih dulu. Tanpa sistem politik demokratis, kehidupan partai politik umumnya tidak bebas, tidak otonom, dan tidak kompetitif (Munafrizal Manan, 2012). Sebagai saluran utama pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden, demokratisasi internal partai politik menjadi sebuah keniscayaan. Artinya, pasangan calon yang diajukan harus berasal dari hasil sebuah proses yang terbuka dan partisipatif. Dengan cara seperti itu, posisi sentral (seperti ketua umum, ketua dewan pembina dan lain lain) di partai politik tidak otomatis menjadi jalan tol menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden.

Melihat realitas empirik selama ini, mengharapkan semua partai politik untuk lebih demokratis. Karena itu, tidak ada pilihan lain, kecuali undang undang tentang partai politik memberikan paksaan yang tak mungkin dihindari.

KESIMPULAN

Tujuan Pemilu dan demokratisnya sebuah pemilu guna kepentingan pembangunan demokrasi, juga terdapat fungsi pemilu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu :

1. Sebagai sarana legitimasi politik, terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik untuk mendapatkan sumber otoritas dan kekuatan politiknya.

2. Fungsi perwakilan rakyat. Pemilu nasional serentak memiliki sejumlah keuntungan yang bersifat hipotetik dilihat dari sisi pelebagaan politik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.
3. Pemilu nasional secara serentak mendorong kualitas partai politik yang lebih demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Didik Himmawan, & Ibnu Rusydi. (2022). Pengabdian Masyarakat Melalui Kegiatan Fun English For Elementary School Di Desa Kedokan Gabus Indramayu. *Community: Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 38–43. <https://doi.org/10.61166/community.v1i1.5>
- Adiyana Slamet (2016). Media Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Volume VI No. 1/Juni*
<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/240>
- Amung Ma'mun. (2014) Perspektif Kebijakan Pembangunan Olahraga dalam Era Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional di Indonesia. *ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan*. <https://doi.org/10.2121/atikan-journal.v4i2.13>
- Diana Sari, Dian Antini, Didik Himmawan, & Ibnu Rusydi. (2022). Pengabdian Masyarakat melalui Sosialisasi Mini Bank Dalam Upaya Meningkatkan Minat Menabung Bagi Anak-Anak Di Desa Rancamulya Indramayu. *ENGAGEMENT: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 23–30. <https://doi.org/10.58355/engagement.v1i1.1>
- Didik Himmawan, Ahmad Khotibul Umam, & Rodotul Janah. (2023). Pemberdayaan Anak-Anak Di Desa Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu. *Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 42–52. <https://doi.org/10.58355/dpl.v1i1.9>
- Didik Himmawan, Ibnu Rusydi, & Dini Syifa Agustina. (2023). Community Empowerment at Sukagumiwang Village Elementary School, Sukagumiwang District, Indramayu Regency Using the Mind Mapping Method. *Quality : Journal Of Education, Arabic And Islamic Studies*, 1(2), 61–69. <https://doi.org/10.58355/qwt.v1i2.17>
- Galuh Kartiko. (2009). Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009*
- Nanik Prasetyoningsih. (2014). Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 21 No. 2 Desember 2014

- H. Soebagio. (2008). Implikasi Golongan Putih Dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi Di Indonesia. *Makara, Sosial Humaniora*, vol. 12, no. 2, desember 2008: 82-86
- Ramlan Surbakti, Didiék Supriyanto, Topo Santoso. (2008). Perencanaan sistem pemilu untuk pembangunan tata politik demokratis. *Partnership for Governance Reform Indonesia*
- Redy Hendra Gunawan. (2020). Political Communication Channel Political Communication in The Development of Democracy on Legislative Election of DPR-RI in Bogor City. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(02), 141-151. <https://doi.org/10.46937/18202031350>
- Sugiono. (2010). *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Whindy Salsa Nabila. (2021). Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. <file:///C:/Users/user/Downloads/Dampak%20Pemilihan%20Umm%20Serentak%20Bagi%20Pembangunan%20Demokrasi%20Indonesia-1.pdf>
- Y. D. P. Hapsari, and R. Saraswati, "Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 5, no. 1, pp. 70-84, Jan. 2023. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.70-84>